

Mengukur Tanggung Jawab Dinas Lingkungan Hidup Atas Sampah Rumah Tangga Di Makassar

Sitti Nurfadillah Basin Daun ¹, Lauddin Marsuni ², Mohammad Arif ³

¹²³ Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Surel Koresponden: nurfadillahumi@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat efektivitas kerjanya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan lapangan, di mana data diperoleh melalui penyebaran kuesioner guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai kualitas layanan, pengawasan, dan responsivitas pengelolaan sampah. Pembaharuan penelitian ini terletak pada upaya mengukur tanggung jawab institusional secara konkret melalui indikator operasional, khususnya pada aspek pengawasan rute dan jadwal pengangkutan sampah yang jarang dianalisis secara spesifik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab dalam pengelolaan sampah rumah tangga tergolong cukup efektif, namun belum optimal karena masih ditemui kendala internal, terutama lemahnya sistem pengawasan operasional dan ketergantungan pada kedisiplinan petugas lapangan. Akibatnya, berbagai permasalahan layanan cenderung diketahui setelah muncul keluhan dari masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan sampah sangat dipengaruhi oleh konsistensi pengawasan, koordinasi internal, serta sistem pemantauan yang terintegrasi. Penelitian ini memberikan rekomendasi berupa penguatan mekanisme pengawasan rute dan jadwal pengangkutan, optimalisasi pemanfaatan teknologi pelaporan yang telah tersedia, serta penyusunan standar tindak lanjut yang terukur guna meningkatkan kualitas layanan pengelolaan sampah rumah tangga secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Dinas Lingkungan Hidup; Pengelolaan; Sampah Rumah Tangga.

Abstract: *This study aims to analyze the implementation of the Environmental Agency's responsibilities in managing household waste in Makassar City and identify factors influencing its effectiveness. This study employed an empirical legal method with a field approach, where data were collected through questionnaires to obtain accurate information on service quality, supervision, and responsiveness of waste management. The innovation of this study lies in its efforts to concretely measure institutional responsibility through operational indicators, particularly the supervision of waste collection routes and schedules, which are rarely analyzed specifically. The results of this study indicate that the implementation of responsibilities in household waste management is quite effective, but not optimal due to ongoing internal constraints, particularly a weak operational oversight system and reliance on the discipline of field officers. As a result, various service issues tend to be discovered after complaints from the public. The study's conclusions confirm that the effectiveness of waste management is greatly influenced by consistent supervision, internal coordination, and an integrated monitoring system. This study provides recommendations for strengthening the monitoring mechanism for routes and schedules, optimizing the use of*

existing reporting technology, and developing measurable follow-up standards to sustainably improve the quality of household waste management services.

Keywords: *Environmental Agency; Management; Household Waste.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan telah mendorong kenaikan signifikan volume sampah rumah tangga, termasuk di Kota Makassar. Dinamika tersebut menempatkan pengelolaan sampah sebagai persoalan strategis yang tidak hanya berkaitan dengan kebersihan kota, tetapi juga dengan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.[1] Dalam praktiknya, masih ditemukan keterlambatan pengangkutan, penumpukan sampah pada titik tertentu, serta rendahnya konsistensi masyarakat dalam melakukan pemilahan dan pembuangan sesuai jadwal yang ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan persampahan bukan semata-mata isu teknis operasional, melainkan juga menyangkut efektivitas fungsi kelembagaan dan relasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat sebagai subjek hukum.[2] Dengan demikian, pengelolaan sampah rumah tangga menjadi arena penting untuk menilai sejauh mana tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dijalankan secara akuntabel dan responsif.[3]

Secara normatif, kewenangan pengelolaan persampahan merupakan bagian dari urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sementara kewajiban penyelenggaraan pengelolaan sampah secara sistematis dan berkelanjutan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.[4] Di sisi lain, hak setiap warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[5] Meskipun kerangka hukum telah tersedia secara relatif komprehensif, persoalan muncul pada tataran implementasi, khususnya dalam hal pengawasan operasional, ketersediaan sarana dan prasarana, serta pembentukan kesadaran hukum masyarakat. Permasalahan hukum yang timbul tidak lagi terbatas pada ada atau tidaknya kewenangan, melainkan pada bagaimana tanggung jawab administratif tersebut dijalankan secara efektif dan memenuhi prinsip *good governance*. [6]

Sejumlah penelitian sebelumnya umumnya membahas pengelolaan sampah dari perspektif kebijakan lingkungan, partisipasi masyarakat, atau efektivitas program 3R (*Reduce-Reuse-Recycle*) secara umum.[7] Kajian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami dimensi sosial dan teknis pengelolaan sampah, namun belum secara khusus menempatkan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagai objek analisis yang diukur berdasarkan indikator tanggung jawab kelembagaan dan efektivitas hukum. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan penelitian dalam mengintegrasikan analisis normatif mengenai kewenangan pemerintah daerah dengan temuan empiris mengenai pelaksanaan pengawasan dan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengajukan pertanyaan: (1) bagaimana pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Makassar; dan (2) faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas fungsi tersebut. Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan empiris-konseptual yang secara spesifik mengukur tanggung jawab institusional melalui indikator operasional pengawasan, sarana prasarana, dan kesadaran masyarakat dalam satu kerangka analisis yang terpadu, sehingga memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola persampahan yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris dengan pendekatan lapangan yang bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Makassar serta melihat bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam praktik. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan fokus pada Dinas Lingkungan Hidup sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Populasi penelitian mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga, sedangkan penentuan sampel dilakukan melalui teknik purposive sampling, dengan memilih responden yang dianggap relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian, yaitu pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan masyarakat. Jenis data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara

langsung melalui penyebaran kuesioner dan observasi lapangan, sementara data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah buku, jurnal ilmiah, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Teknik pengumpulan data dilakukan secara sistematis melalui kuesioner sebagai instrumen utama, disertai dokumentasi terhadap dokumen yang relevan. Analisis data dilakukan secara empiris dengan mengintegrasikan temuan lapangan dan bahan hukum yang dikaji, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan keterkaitan antara fakta empiris dan permasalahan hukum yang diteliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Makassar

Pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Makassar dapat dianalisis melalui pendekatan teori tanggung jawab pemerintahan dan konsep *good governance*. Secara konseptual, tanggung jawab pemerintah daerah merupakan manifestasi dari asas desentralisasi, di mana urusan pengelolaan lingkungan hidup dan persampahan menjadi bagian dari kewenangan daerah sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.[8] Dalam konteks ini, Dinas Lingkungan Hidup tidak hanya bertindak sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai penanggung jawab kebijakan operasional di bidang persampahan.

Lebih lanjut, kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah secara sistematis dan berkelanjutan ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.[9] Norma tersebut menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama dalam perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah. Dalam praktik di Kota Makassar, fungsi tersebut diwujudkan melalui kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pengawasan sampah rumah tangga hingga ke tempat pemrosesan akhir.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, pelaksanaan fungsi tersebut menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup, terutama pada aspek operasional pengangkutan sampah yang telah berjalan rutin sesuai jadwal yang ditetapkan. Namun, jika dianalisis melalui indikator akuntabilitas publik, masih terdapat celah dalam sistem pengawasan. Pengawasan terhadap rute dan ketepatan waktu pengangkutan belum sepenuhnya berbasis sistem pemantauan terintegrasi, melainkan masih bergantung pada kedisiplinan petugas dan laporan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip *preventive supervision* belum optimal diterapkan.

Secara normatif, kewajiban pengawasan melekat pada setiap tindakan administrasi pemerintahan sebagai bentuk *legal responsibility*. Apabila terjadi kelalaian dalam pelayanan publik, maka tanggung jawab administratif tetap berada pada instansi penyelenggara.[10] Prinsip ini sejalan dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik yang menuntut adanya kepastian layanan, transparansi, dan responsivitas. Dalam praktiknya, permasalahan layanan di Makassar kerap diketahui setelah adanya keluhan masyarakat, yang menunjukkan bahwa mekanisme deteksi dini belum berjalan efektif.[11]

Dari perspektif sosiologis, pengelolaan sampah rumah tangga juga dipengaruhi oleh kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah. Di beberapa wilayah, masih ditemukan pola pembuangan tidak sesuai waktu yang ditentukan. Kebiasaan ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup karena mengganggu ritme pengangkutan yang telah dijadwalkan. Dengan demikian, pelaksanaan fungsi tidak dapat dilihat semata sebagai persoalan administratif, tetapi juga sebagai persoalan interaksi antara institusi dan budaya hukum masyarakat.[12]

Jika dikaitkan dengan pendekatan evaluatif, efektivitas fungsi Dinas Lingkungan Hidup dapat diukur melalui tiga dimensi utama: kesesuaian dengan norma hukum, capaian operasional, dan tingkat kepuasan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif dan struktural, fungsi telah dijalankan sesuai mandat kewenangan. Namun secara substantif, optimalisasi masih diperlukan pada aspek pengawasan dan sistem kontrol internal agar tanggung jawab tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga

proaktif.[13] Ini sejalan dengan pandangan bahwa akuntabilitas memerlukan standar layanan publik yang mencakup transparansi, penegakan hukum, keadilan, kepastian, dan ketepatan waktu.[14]

Dengan demikian, pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Makassar telah berjalan dalam kerangka kewenangan yang sah dan terstruktur, tetapi masih memerlukan penguatan pada sistem pengawasan operasional guna mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.[15]

2. Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Efektivitas fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh faktor struktural dan kultural yang memengaruhi pelaksanaannya. Dalam perspektif teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima unsur, yakni substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum. Dalam konteks penelitian ini, dua faktor yang paling dominan adalah sarana prasarana dan kesadaran masyarakat.[16]

a. Sarana dan Prasarana

Secara normatif, kewajiban pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas pengelolaan sampah merupakan konsekuensi dari tanggung jawab pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Ketentuan tersebut mengamanatkan penyediaan sistem pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, hingga pemrosesan akhir yang memadai dan berkelanjutan. Namun, ketersediaan sarana pengangkut sampah di beberapa kecamatan, seperti Tamalanrea, masih menjadi kendala yang memengaruhi efektivitas pengelolaan limbah secara keseluruhan.[17]

Studi menunjukkan bahwa kurangnya sarana dan prasarana yang memadai berkontribusi pada belum optimalnya pengelolaan sampah, serta masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan karena keterbatasan ini.[18]

Berdasarkan data penelitian, ketersediaan armada pengangkut, kendaraan roda tiga, serta fasilitas Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R) sudah tersedia di beberapa wilayah. Namun distribusinya belum sepenuhnya proporsional dengan jumlah rumah tangga yang mencapai ratusan ribu unit dan tersebar di berbagai kecamatan. Ketimpangan ini berdampak pada keterlambatan pengangkutan di beberapa titik, terutama wilayah dengan akses jalan sempit dan kepadatan tinggi. Fasilitas pengelolaan sampah yang tidak memadai ini diperparah oleh resistensi birokrasi, keterbatasan anggaran, dan kurangnya personel, yang semuanya menghambat perubahan metode pengelolaan sampah secara efektif.[19]

Dari sudut pandang hukum administrasi, keterbatasan sarana dapat memengaruhi kualitas penyelenggaraan kewenangan. Walaupun kewenangan telah diperoleh melalui mekanisme atribusi, efektivitas pelaksanaannya tetap memerlukan dukungan sumber daya. Tanpa sarana yang memadai, pelaksanaan fungsi berpotensi bersifat formalitas administratif tanpa capaian substantif. Bahkan, minimnya fasilitas dan infrastruktur seringkali menjadi penghambat utama dalam optimalisasi pelaksanaan pengelolaan sampah.[20] Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas pengelolaan sampah dan sarana prasarana yang mendukung.[21]

Selain itu, kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) juga menjadi faktor penentu. Kondisi kelebihan kapasitas di TPA menunjukkan bahwa orientasi pengelolaan masih cenderung bertumpu pada pola kumpul-angkut-buang, belum sepenuhnya bertransformasi ke pendekatan pengurangan dari sumber. Padahal, prinsip *reduce, reuse, recycle* (3R) merupakan amanat kebijakan nasional yang menuntut pergeseran paradigma pengelolaan. Kesenjangan antara kebijakan dan implementasi ini diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia yang terampil

di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu, sehingga menghambat efektivitas operasional.[22]

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana tidak hanya berdampak teknis, tetapi juga berdampak pada pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterbatasan ini juga mencerminkan tantangan birokrasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik yang efisien, terutama terkait dengan perencanaan anggaran dan alokasi sumber daya untuk pengadaan infrastruktur vital.[23]

b. Kesadaran Masyarakat

Faktor kedua yang memengaruhi efektivitas adalah kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah rumah tangga. Secara konseptual, pengelolaan sampah merupakan bentuk *shared responsibility* antara pemerintah dan warga. Pemerintah menyediakan sistem, sementara masyarakat berkewajiban mematuhi tata cara pengelolaan. Namun, rendahnya partisipasi aktif dari masyarakat lokal masih menjadi kendala signifikan dalam mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan, terutama dalam aspek pemilahan sampah di tingkat rumah tangga.[24]

Penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum konsisten dalam melakukan pemilahan sampah dan membuang sampah sesuai jadwal. Rendahnya partisipasi dalam program daur ulang dan kerja bakti lingkungan menunjukkan bahwa budaya hukum (*legal culture*) terkait kebersihan belum terbentuk secara optimal.[25]

Secara normatif, kewajiban masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup. Dengan demikian, apabila

masyarakat tidak menjalankan kewajiban tersebut, maka efektivitas kebijakan pemerintah menjadi terhambat.[26]

Dalam perspektif sosiologis, kesadaran hukum tidak hanya terbentuk melalui ancaman sanksi, tetapi juga melalui edukasi, pembiasaan, dan keteladanan. Oleh karena itu, strategi Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan penyuluhan dan kampanye kebersihan merupakan langkah preventif yang relevan. Namun, efektivitasnya bergantung pada kontinuitas program dan integrasi dengan lembaga pendidikan, komunitas, serta aparat kelurahan.[27]

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kota Makassar telah berjalan dalam kerangka kewenangan yang sah dan menunjukkan tingkat efektivitas yang cukup, terutama pada aspek operasional pengumpulan dan pengangkutan sampah. Namun demikian, pelaksanaan tersebut belum optimal karena masih terdapat kelemahan pada sistem pengawasan rute dan jadwal pengangkutan yang cenderung bersifat reaktif dan bergantung pada laporan masyarakat. Efektivitas fungsi tersebut dipengaruhi secara signifikan oleh keterbatasan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya proporsional dengan volume dan sebaran timbulan sampah, serta oleh tingkat kesadaran masyarakat yang belum konsisten dalam melakukan pemilahan dan pembuangan sampah sesuai ketentuan. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya ditentukan oleh kapasitas struktural pemerintah daerah, tetapi juga oleh partisipasi aktif dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, penguatan sistem pengawasan operasional berbasis pemantauan terintegrasi, pemerataan penyediaan sarana pendukung, serta peningkatan edukasi dan pembinaan kesadaran masyarakat menjadi langkah strategis untuk mendorong pengelolaan sampah rumah tangga yang lebih akuntabel, responsif, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- [1] A. J. H. Winnia, M. V. Ristanto, and E. Ernyasih, "Efektivitas Program Pengelolaan Sampah Terpadu dalam Menurunkan Risiko Paparan Vektor dan Zoonosis di Kota Metropolitan," *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 4, no. 9, pp. 2159–2166, Aug. 2025, doi: 10.56799/jim.v4i9.10882.
- [2] T. Saputra, S. Zuhdi, and I. Setiawan, "Charting a Greener Future: Collaborative Governance Dynamics in Pekanbaru Sustainable Waste Management," *International Journal of Sustainable Development and Planning*, vol. 20, no. 04, pp. 1655–1663, Apr. 2025, doi: 10.18280/ijstdp.200427.
- [3] S. M. Nabil and A. L. Citrawan, "Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengelolaan Sampah Anorganik Pasar Ciomas Dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan," *Beleid*, vol. 3, no. 1, p. 1, May 2025, doi: 10.51825/beleid.v3i1.24762.
- [4] A. H. Masdiah, Y. Sopiana, and D. Arisanty, "DPRD Recess Fund Regulation and Government Governance Problems: A Literature Study on Policy Effectiveness and Its Challenges," *International Journal of Science and Society*, vol. 8, no. 1, pp. 17–26, Jan. 2026, doi: 10.54783/ijsoc.v8i1.1600.
- [5] Zilda Khilmatus Shokhikhah, "Hak Konstitusional Generasi Mendatang atas Lingkungan Hidup Layak : Kajian Hukum Tata Negara terhadap Tanggung Jawab Negara dalam Pembangunan Berkelanjutan," *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, vol. 4, no. 3, pp. 175–186, Jun. 2025, doi: 10.55606/jurrish.v4i3.5767.
- [6] Benny Simanjuntak, Samuel Sinaga, Togar Manullang, and Martua Pasaribu, "Teori Hukum sebagai Instrumen Analisis Normatif dan Sosiologis," *Journal of Multidisciplinary Law Studies*, vol. 1, no. 1, pp. 56–65, Jan. 2026, doi: 10.60153/jomlas.3i2.260.
- [7] S. Haq *et al.*, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Plastik Terpadu di Nagari Batu Basa," *Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 5, no. 1, pp. 42–46, Jan. 2026, doi: 10.47233/jpmitc.v5i1.4327.
- [8] Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, "Analisis Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah," *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, vol. 3, no. 1, pp. 141–162, Feb. 2025, doi: 10.59581/jhsp-widyakarya.v3i1.4718.
- [9] E. Handayani, C. A. Setiyono, A. T. Pursetiani, A. E. Prihama, and N. Siyam, "Sosialisasi dan Pelatihan Pembuatan Ecobricks dalam Pengelolaan Sampah Plastik," *Jurnal Bina Desa*, vol. 4, no. 2, pp. 157–164, Feb. 2023, doi: 10.15294/jbd.v4i2.32252.

- [10] T. Br Sembiring, D. Azura, N. putri Manulang, M. hirzi aldivie Ginting, and M. Harahap, "Pemerintah Sebagai Subjek Hukum Administrasi: Tinjauan Atas Tanggung Jawab Negara Dalam Maladministrasi Publik," *Journal of Innovative and Creativity (Joecy)*, vol. 5, no. 2, pp. 11606–11611, Jul. 2025, doi: 10.31004/joecy.v5i2.1792.
- [11] S. H. Arhas, R. Niswaty, S. Suprianto, and J. Jamaluddin, "PUBLIC SERVICE STANDARDS IN THE CITY'S LABOR DEPARTMENT MAKASSAR CITY," *Natapraja*, vol. 10, no. 1, pp. 70–77, May 2022, doi: 10.21831/natapraja.v10i1.44124.
- [12] Sherina Faiha Imanika and Abdul Rohman, "Implementasi Peraturan Asuransi Lingkungan Hidup dalam Mencegah Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup," *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, pp. 23–28, Jul. 2022, doi: 10.29313/jrih.v2i1.656.
- [13] H. Anto, S. Alamsyah, and A. Indrawan, "Implementasi Pelaporan Akuntansi Sektor Publik dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Kinerja pada Instansi Pemerintah," *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, vol. 19, no. 2, p. 184, Jul. 2022, doi: 10.30651/blc.v19i2.13522.
- [14] I. T. Utami, "Analisis Hubungan Responveness, Responsibility dan Accountability Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat," *Metta : Jurnal Ilmu Multidisiplin*, vol. 3, no. 1, pp. 1–14, Apr. 2023, doi: 10.37329/metta.v3i1.2172.
- [15] M. D. Latanna, B. Gunawan, M. L. Franco-García, and H. Bressers, "Governance Assessment of Community-Based Waste Reduction Program in Makassar," *Sustainability*, vol. 15, no. 19, p. 14371, Sep. 2023, doi: 10.3390/su151914371.
- [16] A. F. Larasati and E. B. Santoso, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transisi Ekonomi Sirkular Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kota Surabaya," *Jurnal Penataan Ruang*, p. 9, Aug. 2023, doi: 10.12962/j2716179X.v18i1.17229.
- [17] Nurmita Sari and Tetty Dwiyaniti, "Implementasi Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar," *Jurnal Quantum Publik*, vol. 1, no. 2, pp. 36–45, Mar. 2025, doi: 10.55638/publik.v1i2.153.
- [18] A. Nagong, "STUDI TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SAMARINDA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH," *Jurnal Administrative Reform*, vol. 8, no. 2, p. 105, Jan. 2021, doi: 10.52239/jar.v8i2.4540.
- [19] M. Madani, "Agenda Setting Pengelolaan Sampah Pasar di Kota Makassar," *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, vol. 1, no. 1, Apr. 2011, doi: 10.26618/ojip.v1i1.12.
- [20] I. K. Sudiana, I. D. K. Sastrawidana, and N. N. Widiasih, "ANALISIS FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT EFEKTIVITAS PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER DI KECAMATAN BULELENG," *ECOTROPHIC: Jurnal Ilmu Lingkungan*

- (*Journal of Environmental Science*), vol. 19, no. 1, pp. 68–80, Aug. 2025, doi: 10.24843/EJES.2025.v19.i01.p07.
- [21] N. Alfikri, W. Hidayat, and V. I. Girsang, “FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN TINDAKAN MEMBUANG SAMPAH DI LINGKUNGAN IV KELURAHAN HELVETIA KECAMATAN MEDAN HELVETIA TAHUN 2017,” *Jurnal Riset Hesti Medan Akper Kesdam I/BB Medan*, vol. 3, no. 1, p. 10, Feb. 2018, doi: 10.34008/jurhesti.v3i1.17.
- [22] F. R. Wati, A. Rizqi, M. I. M. Iqbal, S. S. Langi, and D. N. Putri, “Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R di Indonesia,” *PERSPEKTIF*, vol. 10, no. 1, pp. 195–203, Jan. 2021, doi: 10.31289/perspektif.v10i1.4296.
- [23] M. Z. Elamin *et al.*, “Analysis of Waste Management in The Village of Disanah, District of Sreseh Sampang, Madura,” *JURNAL KESEHATAN LINGKUNGAN*, vol. 10, no. 4, p. 368, Dec. 2018, doi: 10.20473/jkl.v10i4.2018.368-375.
- [24] M. Nopriani, A. Fauzi, and N. Nuva, “Analisis Prospektif untuk Keberlanjutan Pengelolaan TPS 3R di Kota Pangkalpinang,” *Jurnal Pendidikan Tambusai*, vol. 6, no. 3, Jul. 2022, doi: 10.31004/jptam.v6i3.4504.
- [25] A. Yaqub, F. Baso, E. S. Jafar, and I. Iswandi, “Fikih Lingkungan: Revitalisasi Pengelolaan Sampah di Kota Kendari,” *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, p. 111, Dec. 2022, doi: 10.31332/ai.v0i0.3339.
- [26] S. Utaminingsih, A. Munandar, and S. Su’ad, “Pengembangan Model Pengelolaan Sekolah Berwawasan Lingkungan Menuju Sekolah Adiwiyata pada Sekolah Dasar,” *Jurnal Manajemen Pendidikan: Jurnal Ilmiah Administrasi, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan*, vol. 5, no. 1, pp. 81–94, May 2023, doi: 10.21831/jump.v5i1.52622.
- [27] Rini Aminarti, Nabila Fajriah, Della Shinta Claudiya, Imel Tri Ulina Hutabarat, and Sahala Fransiskus Marbun, “ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN DAN SOSIAL AKIBAT PENUMPUKAN SAMPAH DI JALAN SIPIROK AREA,” *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA*, vol. 3, no. 6, pp. 174–183, Nov. 2025, doi: 10.61722/jipm.v3i6.1597.